



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 3394/SEK/KU.04.2/12/2021 31 Desember 2021
Lampiran : Satu Berkas
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Rencana PNBP Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan.

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat dari Direktur PNBP Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Nomor S-53/AG/AG.7/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Perihal Penyampaian Rencana PNBP Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana surat terlampir, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja melakukan Instalasi Aplikasi dan Database TPNBP Versi 6.0 (*versi portable*) dan petunjuk penggunaan Aplikasi TPNBP dapat di unduh pada <https://s.id/PNBP2023>;
2. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja menginput data target PNBP pada Aplikasi TPNBP Versi 6.0;
3. Sumber data dalam penyusunan Target PNBP tahun 2023 adalah data realisasi tahun 2021 yang dapat dikompilasi dari Aplikasi SPAN dan Aplikasi SIMARI pada periode Januari s.d 31 Desember 2021;
4. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja wajib mengirimkan *back up* ADK TPNBP ke Biro Keuangan melalui laman <https://s.id/TPNBP2023> dan dikirimkan ke masing – masing Tingkat Banding;
5. Batas waktu penyampaian ADK dari Satuan Kerja tanggal 7 Januari 2022 sudah diterima oleh Tingkat Banding dan Biro Keuangan;
6. Jika terdapat kendala dalam penyusunan Target PNBP pada Aplikasi TPNBP Versi 6.0 dapat menghubungi:
 - Lilies Ainany, S.E., M.M 081911119009

- M. Ali Zaki, S.H., M.H 081311026556
- Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom 081290265816
- Galuh Admiati, S.E 081363009911
- Vika Pratiwi, S.E 081312025205
- Rizky Amelia, S.E 081542012752
- Adia Maududi, S.Kom 081282297123

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Tembusan:

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-53/AG/AG.7/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Rencana PNBP Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023

21 Desember 2021

Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Pejabat Setingkat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

Dalam rangka penyusunan Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi Pengelola PNBPN mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan rencana PNBPN atas Bagian Anggaran yang menjadi tugas dan kewenangannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.
2. Dalam penyusunan dan penyampaian Rencana PNBPN TA 2023 agar mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN.
3. Penyusunan target dan/atau pagu penggunaan PNBPN TA 2023 agar menggunakan aplikasi TPNBPN Versi 6.0 (versi *portable*), yang dapat diunduh pada situs <https://anggaran.kemenkeu.go.id>.
4. Penyampaian Rencana PNBPN melalui SatuDJA dengan alamat <https://satudja.kemenkeu.go.id>.
5. Tata cara penyusunan PNBPN melalui aplikasi TPNBPN dan penyampaiannya melalui SatuDJA adalah sebagaimana terdapat pada lampiran II surat ini.
6. Batas akhir penyampaian rencana PNBPN Kementerian/Lembaga untuk Rencana PNBPN TA 2023 adalah sebagai berikut:

NO	RENCANA PNBPN SESUAI SIKLUS APBN	BATAS AKHIR PENYAMPAIAN
1	Dalam rangka penyusunan Kapasitas Fiskal	Januari 2022
2	Penyesuaian dalam rangka penyusunan RUU APBN	Juni 2022
3	Pemutakhiran dalam rangka Penetapan UU APBN	1 minggu setelah UU APBN ditetapkan

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga



Wawan Sunarjo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
 2. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara
- Dipisahkan

DAFTAR PEJABAT KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
5. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI
8. Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung RI
9. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
10. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
12. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
13. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
16. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
35. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
36. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
37. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
38. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
39. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
40. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
41. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

42. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
43. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
44. Asisten Perencanaan Kepolisian Negara RI
45. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
46. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
47. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
48. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
49. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
50. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
51. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
52. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
53. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
54. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
55. Sekretaris Utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
56. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
57. Sekretaris Utama Komisi Pemilihan Umum
58. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64. Sekretaris Utama Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
65. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67. Sekretaris Utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha
68. Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
69. Sekretaris Utama Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
70. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
71. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
72. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)
73. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)
74. Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
75. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
76. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
77. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
78. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
79. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA PNBP TA 2023 MELALUI APLIKASI

1. Penyusunan Rencana PNBP TA 2023 menggunakan aplikasi TPNBP Versi 6.0 (*versi portable*)
Aplikasi TPNBP Versi 6.0 dapat diunduh di laman <https://anggaran.kemenkeu.go.id>, Menu : Layanan – Aplikasi - TPNBP.
2. Melakukan sinkronisasi data TPNBP Versi 5.0 dan Versi 6.0, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. *Backup* ADK TPNBP Versi 5.0 menggunakan aplikasi TPNBP Versi 5.0
 - b. *Download* dan *install* aplikasi dan database TPNBP Versi 6.0 (*portable*)
 - c. *Restore* ADK TPNBP versi 5.0 ke Versi 6.0
 - d. *Copy Target* ke Pagu Indikatif TA 2023
 - e. Menyusun Rencana PNBP sesuai ketentuan yang berlaku
3. Hal-hal yang baru di aplikasi TPNBP Versi 6.0 :
 - a. *Input* Rincian Penerimaan Bulanan per satker per akun.
 - b. *Input* MTBF Pagu Penggunaan per satker
 - c. Data : Target PNBP, Rincian Penerimaan Bulanan dan MTBF Target PNBP akan disinkronisasikan dengan aplikasi SAKTI (hanya pada siklus perencanaan)
 - d. Pembulatan ke ribuan terdekat (sinkronisasi dengan pola pembulatan aplikasi SAKTI)
Untuk target pembulatannya ke atas, untuk pagu penggunaan pembulatannya ke bawah
4. Penyampaian Rencana PNBP melalui aplikasi SatuDJA, dengan alamat <https://satudja.kemenkeu.go.id>
Untuk *User id* dan *password* harap berkoordinasi dengan mitra kerja di Direktorat PNBP K/L dan Direktorat PNBP SDA dan KND, Ditjen Anggaran. Demi keamanan data Anda, segera lakukan perubahan *password*

